

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

China dan Taiwan menjadi wilayah yang terpisah setelah terjadinya perang saudara hingga pada akhirnya pemerintahan Kuomintang mendirikan pemerintahannya sendiri. Dalam pandangan China, Taiwan merupakan bagiannya yang hilang sehingga China memiliki ambisi untuk menyatukan Taiwan kembali ke China melalui prinsip *One China Policy* (Pertiwi et al., 2021). Tetapi upaya reunifikasi ini terganggu akibat adanya kerjasama antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Amerika serikat mengakui *One China Policy* sejak tahun 1979 tetapi tetap menjaga hubungannya dengan Taiwan yang didasarkan pada *Taiwan Relations Act* yang dibuat pada tahun yang sama. *Taiwan Relations Act* berisi mengenai kerjasama terutama dalam bidang keamanan dan ekonomi (AIT, 2017).

Pada masa pemerintahan Donald Trump pada tahun 2017 hingga 2020, terjadi peningkatan kerjasama diantara Taiwan dan Amerika Serikat sehingga menimbulkan respon serius dari China (Meredith, 2018). Dalam hal ini, adanya peningkatan kerjasama antara Taiwan dengan Amerika Serikat, dianggap melemahkan *One China Policy* serta dipersepsikan sebagai langkah ofensif yang berpotensi menghalangi ambisi reunifikasi dari China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menegaskan bahwa penjualan senjata tersebut melanggar prinsip *One China Policy* dan berjanji memberikan respons yang tegas

dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan hubungan militer dengan Taiwan (Browne, 2020)

Hal ini dilanjutkan dengan adanya latihan militer di Selat Taiwan. Contohnya Presiden Xi Jinping, memberikan sinyal tegas atas penolakannya terhadap semakin eratnya hubungan Taiwan dan Amerika Serikat dengan menginstruksikan digelarnya latihan tembak langsung di Selat Taiwan dan diadakan pada bulan Maret 2018 (Westcott & Wang. Serenitie, 2018). Langkah defensif Taiwan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dipersepsikan menjadi langkah ofensif yang diartikan sebagai ancaman bagi China sehingga muncul kondisi dilema keamanan. Dilema keamanan menjelaskan jika tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional suatu negara justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain (Tang, 2009).

Dalam situasi ini kemampuan suatu negara yang dimaksudkan untuk pertahanan dapat dipersepsikan sebagai ancaman. Ketika suatu negara menilai tindakan defensif sebagai ancaman maka negara tersebut akan merespon dengan upaya peningkatan kekuatan negaranya. Selain itu, negara juga bisa merespon melalui kecaman atau protes kepada pihak yang bersangkutan. Melalui teori *balance of threat* dijelaskan lebih rinci bagaimana ancaman itu dipersepsikan melalui 4 faktor utama yaitu *aggregate power, geographical proximity, offensive capabilities, perceived intentions*. Selanjutnya, melalui *balance of threat* dijelaskan mekanisme pembentukan persepsi ancaman yang dialami oleh China sehingga menciptakan situasi dilema keamanan, yang kemudian memicu *balancing* untuk merespon ancaman. Dalam hal ini, China berusaha menyeimbangkan ancaman ini

dengan modernisasi kekuatan militernya (Garamone, 2019). China juga menjalankan kebijakan *Big Fund* yang berlanjut pada tahun 2018-2024 yang berfokus untuk meningkatkan kekuatan ekonomi domestiknya (Liu, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengaitkan dengan sejumlah studi literatur terdahulu, sehingga akan ditemukan hubungan dengan karya ilmiah yang disebutkan. Adapun studi literatur yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Yang pertama yaitu jurnal berjudul *“The Implication of the US-Taiwan Relations Towards the US-China Relations Under Obama Administration”* oleh Michelle Alysa pada tahun 2020 menganalisis implikasi hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat terhadap hubungan Amerika Serikat–China pada periode 2009–2016. Dengan menggunakan teori *security dilemma*, *offensive realism*, dan *defensive realism*, penelitian ini menjelaskan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan serta kebijakan *Pivot to Asia* menjadi pemicu utama ketegangan, perlombaan senjata, dan siklus keamanan di kawasan. Sebagai respons, China melakukan modernisasi militer besar-besaran serta memperkuat integrasi ekonomi dengan Taiwan melalui ECFA, sementara Taiwan mendorong partisipasi dalam TPP. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Taiwan tidak berstatus negara, posisinya strategis sebagai alat tekanan Amerika Serikat terhadap China.

Jurnal yang kedua berjudul *“United States-Taiwan Security Cooperation: Analysing its Security Implications for China”* oleh Amna Mahmood dan Ashfaq U. Rehman pada tahun 2024 membahas tentang kerjasama keamanan antara Taiwan

dan Amerika Serikat memengaruhi kepentingan strategis serta kebijakan pertahanan China. Bentuk kerjasama mencakup penjualan senjata, latihan militer bersama, hingga dukungan diplomatik yang memperkuat posisi Taiwan di kawasan. Dengan menggunakan kerangka *realisme* dan *neorealisme*, artikel ini menekankan bahwa langkah Amerika Serikat dipersepsikan sebagai ancaman langsung bagi China, sehingga mendorong modernisasi militer, pengembangan sistem rudal, serta strategi *Anti-Access/Area Denial (A2/AD)* untuk menyeimbangkan kekuatan di Selat Taiwan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama keamanan Taiwan dengan Amerika Serikat tidak hanya memperburuk dilema keamanan, tetapi juga memperkuat siklus mistrust antara Washington dan Beijing.

Jurnal ketiga berjudul Jurnal yang ketiga berjudul “Strategi Ekonomi China Menghadapi Intervensi Amerika Serikat Melalui Taiwan” oleh Wahyu Gusriandari, Guntur Eko Saputro, Lukman Yudho Prakoso pada tahun 2023 membahas tentang bagaimana China merespons intervensi Amerika Serikat dengan memanfaatkan strategi politik, ekonomi, dan militer. Dengan kerangka sekuritisasi oleh Barry Buzan, penelitian ini menyoroti Taiwan sebagai ancaman di tiga sektor yaitu militer (pasokan senjata Amerika Serikat memperkuat pertahanan Taiwan), politik (upaya Taiwan memperoleh pengakuan internasional dan ideologi demokrasi yang berseberangan dengan China), serta ekonomi (kekuatan Taiwan yang berpotensi memperbesar ancaman jika didukung penuh Amerika Serikat). Artikel ini juga menyinggung strategi *strategic ambiguity* yang digunakan Amerika Serikat untuk menjaga kepentingannya tanpa konfrontasi langsung. Sebagai respon, China melakukan modernisasi militer, patroli Selat Taiwan, blokade perdagangan (nanas,

ikan, pasir), serta diplomasi internasional untuk mengisolasi Taiwan. Penelitian ini menegaskan komitmen China mempertahankan *One China Policy* sekaligus menekan pengaruh Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat dilihat fokus penulisan terdapat pada dilema keamanan China terhadap kerjasama Taiwan – Amerika Serikat pada tahun 2017-2020 maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dilema keamanan China terhadap kerjasama Taiwan-Amerika Serikat pada tahun 2017-2020 berdasarkan prespektif *Balance of Threat*?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian berikut ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, tujuan secara umum dan tujuan secara khusus :

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui dilema keamanan China terhadap kerjasama Taiwan - Amerika Serikat pada tahun 2017 - 2020 berdasarkan prespektif *Balance of Threat*.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 *Balance of Threat*

Balance of threat merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Stephen M. Walt. Dalam teori ini Walt menjelaskan bahwa negara tidak selalu menyeimbangkan diri terhadap kekuatan terbesar, melainkan terhadap negara yang dianggap paling mengancam (Walt, 1985). Artinya, suatu negara tidak otomatis dipandang berbahaya hanya karena memiliki kekuatan besar, tetapi karena karakteristik tertentu yang membuat negara lain merasa terancam. Untuk mengukur sejauh mana suatu negara dianggap sebagai ancaman ada empat aspek yang membentuk persepsi ancaman, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *perceived intentions*.

Pertama, *aggregate power* merujuk pada total sumber daya suatu negara dalam aspek militer, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian semakin besar kekuatan total sumber daya suatu negara, semakin besar pula potensi ancamannya. Tetapi di sisi lain negara yang dinilai memiliki kekuatan besar bisa menarik karena mampu memberikan keuntungan seperti perlindungan atau bantuan ekonomi. Melihat hal ini negara lain mungkin ingin menjalin hubungan baik untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua, *geographical proximity* menunjukkan kedekatan geografis, kerentanan strategis wilayah bahwa negara yang letaknya berdekatan lebih mudah dipersepsi sebagai

ancaman karena jarak yang dekat membuat proyeksi kekuatan lebih efektif, adanya aktivitas militer di kawasan strategis menunjukkan kesiapan dan potensi penggunaan kekuatan, sehingga meningkatkan persepsi ancaman bagi negara lain. Ketiga, *offensive capabilities* yaitu kemampuan ofensif yang terlihat dari jenis persenjataan, postur militer, kemampuan proyeksi kekuatan untuk melancarkan serangan. Ancaman langsung yang ditimbulkan oleh kapabilitas tersebut dapat mendorong negara-negara untuk melakukan *balancing*. Keempat, *perceived intentions* berkaitan dengan niat agresif yang dipersepsikan. Negara yang dipandang memiliki niat agresif cenderung memicu reaksi *balancing* dari negara lain, bahkan jika kemampuan (kapabilitas) negara tersebut tidak terlalu besar. *Balancing* lebih umum dilakukan daripada *bandwagoning*, karena negara berupaya mempertahankan otonomi dan menghindari risiko terdominasi oleh negara yang dianggap mengancam. Teori *balance of threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt memberikan kerangka penting mengenai faktor – faktor yang membentuk persepsi ancaman, sehingga negara tersebut membentuk aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan negaranya dalam menghadapi ancaman. Walt memaknai *balancing* dengan cara pembentukan aliansi eksternal. Dengan demikian, kerangka ini memfokuskan penjelasan dengan menekankan pembentukan aliansi sebagai bentuk utama *balancing*, sehingga bentuk penyimbangan secara internal yang dilakukan suatu negara belum dijelaskan dan menimbulkan keterbatasan. Literatur lanjutan

memperluas konsep ini dengan memasukkan *internal balancing* sebagai strategi penting dalam menghadapi ancaman.

Dalam perkembangan literatur yang dikemukakan oleh Kai He memperluas konsep *balancing* dengan memasukkan *internal balancing*. Dengan adanya kemunculan kekuatan baru, negara melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap posisinya. *Internal balancing* merupakan upaya negara merespons ancaman atau tekanan eksternal dengan memaksimalkan kapasitas domestiknya, seperti melalui peningkatan mobilisasi militer, percepatan pembangunan ekonomi, penguatan kemampuan pertahanan, serta penerapan strategi politik dan diplomasi yang lebih efektif (He, 2009). Strategi ini memungkinkan negara untuk memperkuat posisinya melalui usaha peningkatan kapasitas negaranya sendiri. Tetapi negara dapat melakukan *external balancing* dengan cara beraliansi dengan negara lain untuk menahan ancaman akibat adanya kekuatan baru tersebut. Dalam penelitian ini difokuskan pada upaya *internal balancing* yang dilakukan oleh negara untuk menghadapi ancaman. Melalui pendekatan ini, negara berupaya membangun otonomi strategis dan meningkatkan daya tahan nasional, sehingga dapat menanggulangi ancaman dengan kekuatan dari negaranya sendiri.

1.4.1.2 Dilema Keamanan

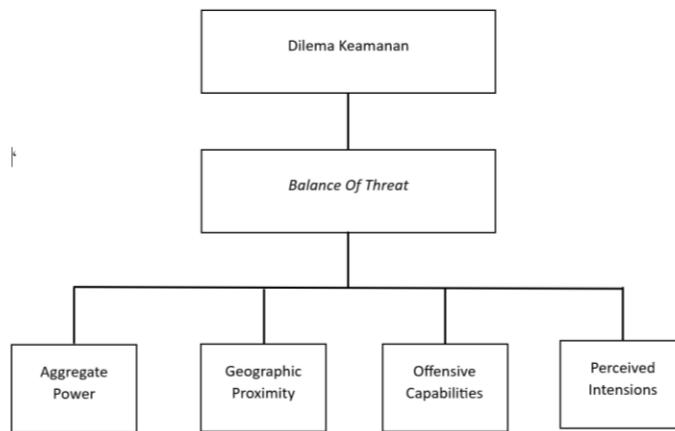
Konsep dilema keamanan pada awalnya diperkenalkan oleh John H. Herz pada tahun 1950. Dalam konsep ini Herz menjelaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, tidak ada otoritas

tertinggi yang dapat menjamin keamanan negara sehingga setiap negara terdorong untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya (Tang, 2009). Namun, langkah defensif ini justru menciptakan rasa tidak aman bagi negara lain yang kemudian merespons dengan memperkuat diri pula. Situasi inilah yang disebut sebagai dilema keamanan, di mana upaya menciptakan rasa aman berujung pada ketidakamanan yang lebih besar. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Jervis pada tahun 1978 melalui kerangka "*Cooperation Under the Security Dilemma*". Jervis menekankan bahwa dilema keamanan muncul karena niat sebenarnya dari suatu negara tidak pernah sepenuhnya jelas, serta adanya kesulitan dalam membedakan antara kapabilitas ofensif dan defensif. Dalam situasi ini, tindakan yang dimaksudkan sebagai defensif sering kali disalahartikan sebagai ofensif, sehingga memicu ketidakamanan yang berkesinambungan.

Melalui teori *balance of threat* yang menjelaskan tentang persepsi ancaman yang ditentukan oleh empat faktor yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *perceived intentions* memperlihatkan bagaimana persepsi ancaman bisa menciptakan dilema keamanan (Salavatian et al., 2015). Aggregate power dan geographic proximity membuat peningkatan kekuatan suatu negara dianggap mengancam negara lain dapat diartikan jika sebuah negara mengembangkan kemampuan ofensif yang signifikan atau dipandang memiliki niat agresif, maka negara lain cenderung melihatnya

sebagai ancaman nyata sehingga membuat negara tersebut merespons dengan meningkatkan kekuatan negaranya.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber : Penulis

Teori *balance of threat* menekankan bahwa negara akan menyeimbangkan diri terhadap aktor yang dianggap paling mengancam. Ancaman dipersepsikan melalui empat faktor yaitu *aggregate power* yang menunjukkan besarnya potensi ancaman dari sumber daya total suatu negara, *geographical proximity* memperlihatkan ancaman lebih nyata dari kedekatan secara geografis, *offensive capabilities* memperlihatkan kemampuan ofensif yang dapat membuat negara lain merasa lebih rentan, *perceived intentions* berhubungan dengan niat agresif suatu negara yang dapat dipersepsikan menjadi ancaman. Keempat faktor tersebut menjelaskan mekanisme pembentukan persepsi ancaman yang pada akhirnya menciptakan dilema keamanan.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama penelitian ini adalah dilema keamanan China dipengaruhi 4 faktor melalui perspektif *balance of threat*, aspek *aggregate power* Taiwan meningkat dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat yang dilandasi oleh *Taiwan Relation Act* melalui kerjasama dalam bidang militer dan ekonomi. Selain itu, faktor *geographical proximity* dan *offensive capabilities* memperburuk sensitivitas China. Wilayah Taiwan hanya berjarak sekitar 160 km dari pesisir China sehingga setiap kehadiran militer Amerika Serikat, termasuk peningkatan transit kapal militer Amerika Serikat di Selat Taiwan yang berjarak 112 mil dari China dianggap mengganggu stabilitas regional. Kapal Amerika Serikat dilengkapi dengan persenjataan canggih yang dapat menjangkau dengan cepat wilayah daratan China dan aktivitas tersebut dipersepsikan sebagai provokasi strategis terhadap China.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kerjasama yang terjadi antara Taiwan dengan Amerika Serikat di kawasan menciptakan dilema keamanan. Hal ini disebabkan karena tindakan defensif bagi Taiwan justru dianggap ofensif oleh China. Di sisi lain, *perceived intentions* dari upaya peningkatan kekuatan Taiwan melalui kerjasamanya dengan Amerika Serikat dipersepsikan China sebagai strategi yang melemahkan China serta memperkuat persepsi ancaman bagi negaranya. Dengan disahkannya *Taiwan Travel Act* (2018) dan *Taipei Act* (2019) menunjukkan dukungan politik Amerika Serikat terhadap Taiwan yang semakin terbuka. Segala bentuk peningkatan kerjasama antara Taiwan dengan Amerika Serikat

dipersepsikan Beijing sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya, dan memunculkan upaya *balancing* dengan cara peningkatan kemampuan secara mandiri oleh China.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang masuk dengan tidak mencari data numerik dari dokumen, arsip, atau literatur terkait (Mulyadi, 2011). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teori *balance of threat* untuk mengidentifikasi 4 faktor pembentuk persepsi ancaman melalui kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat pada masa kepresidenan Donald Trump tahun 2017-2020.

1.7.1. Jangkauan Penelitian

Penulis menetapkan jangkauan penelitian pada tahun 2017 hingga tahun 2020 untuk menjelaskan peningkatan kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat dianggap menjadi ancaman bagi China. Pada tahun 2017 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan persetujuannya atas tujuh kemungkinan Penjualan Militer Asing ke Taiwan. Serta peresmian *Taipei Act* yang dilakukan pada tahun 2020. Konsep *balancing* dalam implementasinya dilakukan dengan *external balancing* melalui pembentukan aliansi; atau *internal balancing* dengan memaksimalkan kapasitas domestiknya melalui penguatan militer, ekonomi, dan pertahanan (He, 2009). Penelitian ini berfokus pada upaya *internal balancing* China sebagai strategi untuk membangun

otonomi strategis dan meningkatkan daya tahan nasional, dalam upaya menghadapi ancaman dan kondisi dilema keamanan.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan sumber - sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman secara teoritis. Dengan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data melalui sumber informasi dari basis data jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan sumber-sumber online yang dapat dipertanggungjawabkan (Prasetyo, 2012). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif dan memungkinkan penulis untuk mengeksplor konteks historis dan dinamika kebijakan luar negeri secara mendalam.

1.7.3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Ahmad & Muslimah, 2021). Pada penelitian ini tahapan dalam proses analisis data dimulai dari pengumpulan data. Penulis mulai melakukan riset dan pencarian data yang relevan untuk menjawab pertanyaan dan menguji hipotesa yang diajukan. Tahapan berikutnya adalah penyajian data, penyajian data berfungsi untuk mengeksplorasi data-data yang relevan dan mempermudah penulis dalam memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut dengan lebih baik. Setelah melakukan tahapan penyajian

data, tahapan berikutnya adalah reduksi data. Proses ini dilakukan untuk membuat data lebih ringkas dan mudah difahami namun tidak merubah keakuratan data untuk penelitian ini. Tahapan tersakhir yaitu penarikan kesimpulan, tahapan ini menjelaskan kesimpulan hasil dari penelitian ini dimana semua informasi dan data yang telah terkumpul menyajikan temuan yang signifikan.

1.7.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Penulisan BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian.

BAB II : Penulisan BAB II berisikan penyajian data mengenai kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat pada era Donald Trump tahun 2017 - 2020 yang menunjukkan bentuk dari *aggregate power* dan *geographical proximity*.

BAB III : Penulisan BAB III berisikan penyajian data mengenai kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat pada era Donald Trump tahun 2017 - 2020 yang menunjukkan bentuk dari *offensive capabilities* dan *perceived intentions*.

BAB IV : Penulisan BAB IV berisikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dan saran untuk penulis berikutnya.